

# PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIK NEGARA KESEJAHTERAAN (STUDI KUALITATIF TERHADAP BEBERAPA NEGARA "UNI EROPA" DAN AUSTRALIA)

Oleh: Dr. H. Amin Ibrahim, MA.<sup>1)</sup>

*Perilaku administrasi dan kebijakan maka di negara maju yang berprinsip welfare state maka kecenderungan dan kenyataan yang terlihat ialah : nilai-nilai negara kesejahteraan merefleksi dalam aturan yang memihak kepada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya perilaku organisasi menjadi acuan, sehingga KKN dapat dihindari dan akhirnya perilaku administrasi (manajemen dan dukungan) dapat dijalankan dengan sehat dan baik.*

---

---

## PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan pengamatan lapangan terhadap beberapa negara Uni Eropa (Perancis, Spanyol, Belanda, Jerman) dan Australia. Waktu Pengamatan / Wawancara / Studi Dokumenter: satu bulan untuk Australia (2001) dan sekitar satu bulan di Uni Eropa (2004). Sementara itu dapat disampaikan di sini bahwa Sistem Pemerintahan yang dianut: Federal (Australia, Jerman); Negara Kesatuan Republik (Perancis, Spanyol); dan Kerajaan yang demokratis (Belanda)

### 1. Pokok-pokok Kebijakan Publik (Umum):

1. *Social Security* (Keamanan/Kesejahteraan Sosial) yang tinggi/baik
2. Public Service (Pelayanan Publik) yang prima (relatif)
3. Good Governance/Perilaku Birokrasi yang berprinsip "abdi masyarakat"

4. Pelestarian nilai-nilai budaya/sejarah, lingkungan dan tataruang yang baik, dengan prinsip self management
5. Rasa aman/Tertib/Disiplin, perlindungan HAM dan Property dan Intellectual Property Right dan tertib hukum yang tinggi
6. Partisipasi Masyarakat yang luas dan berkualitas.
7. E-Government; E-Commerce; E-Learning; E-Information yang telah berjalan baik.

### II. Social Security (Keamanan/Kesejahteraan Sosial) yang baik, terlihat dengan:

1. Upah minimum yang layak tanpa pajak
2. Jaminan sosial bagi penganggur (tersedia "tempat tinggal sementara" dan jaminan hidup layak minimal, sambil berusaha/menunggu lowongan pekerjaan)

---

1) Penulis adalah sebagai tenaga ahli bidang kebijakan publik dalam Studi KLS Bopuncur, kerjasama BPLHD Propinsi Jawa Barat dengan PPSDAL Universitas Padjadjaran, tahun 2003

3. Bebas biaya pendidikan hingga SMU Negeri, bahkan di Jerman hingga universitas negeri.
4. Pajak yang relatif tinggi bagi yang berpenghasilan tinggi/besar (tergantung jenis pekerjaan/usaha) agar kesenjangan tidak mencolok dan sekaligus tanggung jawab sosial dari golongan mampu.
5. Jaminan pensiun sekitar 75% dari gaji semula waktu aktif, dengan fasilitas yang relatif sama, kecuali ada klausul-klausul tertentu sesuai kontrak kerja.
6. Asuransi berbagai jenis, terutama asuransi kesehatan yang layak (misalnya obat/ongkos berobat yang dibayar dulu baru diganti pihak asuransi bagi golongan berpenghasilan menengah ke atas, sedangkan bagi yang berpenghasilan rendah cukup dengan kartu asuransi kesehatan)
7. Harga-harga kebutuhan pokok (primer dan sekunder) yang relatif sesuai dengan daya beli masyarakat (selain harga yang layak, bagi yang berpenghasilan rendah/yang menerima jaminan sosial, disediakan tempat pembelian kebutuhan tersebut dengan harga murah karena disubsidi)
8. Pemerataan pendapatan dan kesenjangan sosial yang tidak mencolok

III. *Public Service* (pelayanan publik) yang prima (relatif) antara lain :

1. Tersedianya jaringan dan alat-alat transportasi dan komunikasi yang beragam dan mudah dengan frekuensi yang tinggi untuk berbagai tujuan/keperluan (bis,

metro, kereta api, angkutan sungai dan udara dengan sistem pelayanan yang terintegrasi dengan baik dan gampang dimanfaatkan/pelayanannya baik dan cepat/otomatis)

2. Pelayanan Informasi/komunikasi yang mudah dan dapat diperoleh di banyak tempat-tempat umum.
3. Pelayanan parkir yang diatur sedemikian rupa sehingga yang parkir di pusat-pusat kota yang padat harus membayar tinggi, sementara ada tempat parkir umum gratis yang disediakan relatif jauh dari pusat – pusat keramaian, tetapi tersedia jaringan transport umum untuk membantu mencapai pusat-pusat kegiatan yang ramai. Karena itu keinginan untuk berlomba memiliki kendaraan pribadi menjadi berkurang, karena hanya berfungsi untuk mencapai fasilitas transportasi umum tersebut. Umumnya orang memiliki kendaraan bukan untuk “gengsi” tetapi memang hanya sesuai kebutuhan minimal saja.
4. Pelayanan “*self service*” yang mudah, praktis dan sudah menjadi budaya keseharian masyarakat banyak.
5. Perbaikan kerusakan jaringan berbagai kepentingan umum (air, telepon, listrik, jaringan transportasi) yang cepat dan berkualitas.

IV. *Good Governance* / Perilaku Birokrasi yang berprinsip “abdi masyarakat” antara lain :

1. Pejabat publik yang jelas apa, siapa dan mengapanya, terbuka, transparan, akuntabel, serta berprinsip abdi masyarakat, dan hanya mempunyai kelebihan fasilitas sekedarnya sesuai tugas dan fungsinya (tidak feodal/neo feodal). Sebagai contoh seorang anggota Parlemen Eropa mendapatkan penghasilan sebulan sekitar: 30.010 Euro (E) atau sekitar 315 juta rupiah/bulan dengan perincian: honorinya 6.590 E; Fasilitas 3.144 E misalnya untuk flat tempat tinggal dan fasilitasnya; biaya perjalanan 4.000 E; keperluan partai sekitar 3.700 E; untuk menggaji stafnya sendiri (misalnya 3 tetap dan 3 part timer) sebesar 12.576 E. Kelihatannya sangat besar bila dirupiahkan, tetapi harga-harga cukup tinggi dan "hanya itulah penghasilan resmi mereka dengan derajat kesibukan yang tinggi (sebetulnya kurang lebih sebanding dengan honor anggota DPR yang sekitar 30 juta rupiah/bulan mengingat perbandingan harga/ daya beli, hanya masalahnya anggota DPR RI "banyak tambahannya " dari berbagai sumber lain (uang sidang, pansus, dan lainnya).
2. Sesuai fungsinya sebagai "abdi masyarakat", pejabat publik tidaklah terlihat "eksklusif" tetapi relatif menyatu dengan masyarakat luas (status sosial dan jabatan tidaklah menjadi ukuran utama membedakan penghargaan sesama). Bandingkan dengan pejabat publik Indonesia yang terkesan "to be served" mestinya "to service" seperti di negara-negara maju.
3. Otonomi Daerah (Otda) berjalan baik: Sebagai contoh Perancis ( Negara Kesatuan), menjalankan Otda dengan prinsip-prinsip antara lain :
  - a. Pemerintahan Daerah sifatnya "mendukung" manajemen pada Pusat.
  - b. Kebijakan-kebijakan yang bersifat kualitatif tetap pada pemerintahan pusat (pendidikan, pengangkatan pegawai, dan lainnya, tetap dikendalikan pusat, sehingga tidak terjadi adanya "raja-raja kecil di daerah") Gubernur atau Walikota berupaya sekuat mungkin untuk "mendukung terselenggaranya Otda", agar target-target kualitatif dari pusat tersebut dapat tercapai dengan baik (dalam konsep federal terlihat kebijakan yang sedikit berbeda karena kewenangan negara bagian yang lebih luas, walaupun standar kualitatif tetap diatur pusat)
4. Pertanggungjawaban publik yang terbuka, dan "bebas KKN" (relatif)
5. Setiap pejabat publik langsung menangani masalah dan bertanggung jawab (misalnya dalam kasus rontoknya bagian terminal 2E dari bandara De Gaulle di Paris, Menteri Transportasi dan Menteri Dalam Negeri, terjun langsung menangani masalahnya secara serius (bukan

sekedar “tinjauan”), sampai tuntas. Meledaknya pabrik kimia di Toulouse Perancis beberapa tahun lalu, Pemerintah Daerah langsung menangani dengan serius dan memperbaiki fasilitas dan apartemen-apartemen yang rusak, ganti rugi termasuk biaya rehabilitasi *shock mental* penduduk, sehingga dalam waktu hanya sekitar beberapa bulan semuanya sudah pulih (tidak menunggu asuransi yang masih memakan waktu penyelesaiannya). Pemda menanganinya lebih dulu dengan baik, urusan asuransi belakangan, yang penting masyarakat yang terlibat musibah yang begitu banyak itu, segera mendapatkan rehabilitasi fisik tempat tinggal/prasarana dan rehabilitasi mental/shock berupa santunan untuk dapat dimanfaatkan mengalihkan suasana taruma sementara dengan liburan dan lainnya. Sementara fasilitas diperbaiki (bukannya bantuan musibah malah diminta kesadaran pihak lain/masyarakat dan di “permainkan” dalam penyalurannya. Prinsip yang dianut, masyarakat yang memndapat musibah harus segera “normal kembali lebih dulu”, urusan lainnya belakangan, dan Pemda memperlihatkan “pelayanan publik” yang prima pada saat-saat kritis itu.

6. Setiap pejabat publik langsung dipilih oleh rakyat dan kampanye mereka realistik saja, langsung menukik kepada masalahnya dan

solusinya (hal ini disebabkan karena memang mereka tidak sedang terpuruk seperti Indonesia, sehingga penajaman masalah dan solusi tersebut dapat diperhitungkan dan “dijual” dengan baik.

7. Pelayanan publik oleh *mass media* untuk kepentingan publik lebih diutamakan, seperti misalnya cuaca, kondisi harga, bukannya dihabiskan dengan hal – hal yang relatif kurang bermanfaat bagi rakyat banyak. Berita selebritis terkenal misalnya hanya singkat saja, tetapi mempersoalkan kebijakan pemerintahan, kondisi sosial, bahkan sindiran-sindiran yang tajam terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang tepat mendapatkan porsi yang besar dalam media berbagai jenis.

V. Pelestarian nilai-nilai budaya/ sejarah, lingkungan, tata-ruang yang terintegrasi dengan baik, dengan prinsip *self management*, antara lain melalui:

1. Pemeliharaan gedung-gedung, tempat-tempat bersejarah, dengan segala kandungan budayanya secara serius oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara baik, dipadukan dengan nilai komersilnya yang didukung oleh pihak swasta, bekerja sama dengan pemerintah. Kemudahan menyaksikan yang didukung berbagai sarana, seperti transportasi khusus, sistem informasi, perhotelan, suvenir, fasilitas umum, sehingga karcis masuk termasuk murah, karena dibantu oleh “penghasilan sarana-sarana pendukung tersebut (contoh:

begitu antusias dan betahnya para pengunjung menikmati tempat-tempat bersejarah seperti intana Versailles, Museum Louvre, menara Eiffel, sungai Seine dan lainnya).

2. Tata ruang wilayah/kota yang tertata dengan baik: di dalam kota tersedia apartemen-apartemen dengan berbagai kategori untuk disewa atau dibeli warga relatif sangat terjangkau sesuai kelasnya, sementara rumah-rumah pribadi hanya diperkenankan di daerah pinggiran kota dan sangat mahal, karena sudah disediakan sarana pendukungnya. Demikian halnya jaringan transportasi yang dilayani dengan sistem yang terintegrasi dengan baik. Swalayan hanya boleh di pinggiran kota, agar keaslian pusat kota dan kegiatan-kegiatan bisnisnya yang kllhas tidak terganggu. Untuk mengimbangi keterbatasan-keterbatasan hidup dalam apartemen-apartemen, maka disediakan fasilitas-fasilitas umum untuk berekreasi, yang banyak dan sangat beragam (sarana olah raga, santai, sarana untuk berkumpul, taman-taman, sarana bermain, semuanya gratis dan terpelihara dengan baik) Lingkungan yang bersih dan lestari diutamakan termasuk sungai-sungai, hutan kota, walaupun tak dapat dihindari ada bagian kota yang disebut "*bronx area*" yang ditangani secara serius agar tidak menular ke wilayah kota lainnya.
3. Umumnya negara-negara maju sangat memelihara bahasa nasionalnya, lebih-lebih Perancis yang bahkan terkesan "*chauvinistic*".

VI. Rasa aman/tertib/disiplin, perlindungan HAM, *property* dan *intellectual property right*, serta tertib hukum yang baik/tinggi:

1. Keamanan masyarakat sangat diutamakan walaupun ada juga "copet" misalnya yang kerap dilakukan para imigran (misalnya di Paris di kawasan jaringan metro)
2. HAM terjaga dengan baik, demikian halnya *property* dan *intellectual property right* (misalnya foto copy buku secara lengkap (membajak) tidak diijinkan jangkakan menjualnya seperti di Indonesia (kendatipun foto copy ditempat usaha foto copy kita lakukan sendiri dan dibayar).
3. Karir yang jelas, perjanjian kerja yang jelas, sehingga tinggal memilih kesempatan sesuai kemampuan dan lowongan yang tersedia.
4. Tertib hukum sangat tinggi, budaya hukum sudah menjadi "budaya masyarakat". Pemngaduan masyarakat dapat dari hal-hal yang sangat elementer, apalagi yang besar, ditangani dengan baik, segera dan tuntas. Aturan-aturan atau Kebijakan Publik dibuat sesuai makna "*welfare state*" artinya selalu mengacu kepada kepentingan rakyat banyak. Sebagai contoh: sewa kendaraan di hari libur akan jauh lebih murah karena banyak rakyat membutuhkannya. Demikian halnya harga-harga diturunkan secara signifikan menjelang Natal dan Tahun Baru (bukan ditunkan secara signifikan setelah harganya dinaikkan) (Bandingkan di negara kita justru menjelang hari raya / tahun baru, justru ongkos transport

dinaikkan pemerintah secara resmi, belum yang tidak resmi).

#### VII. Partisipasi Masyarakat yang tinggi/luas:

1. Disiplin masyarakat menjaga milik publik tinggi/baik, seperti tidak merusak fasilitas umum, tidak mengotori, tidak mengganggu binatang di taman kota, membuang sampah pada tempatnya, mentaati aturan lalu lintas dengan baik, semua perilaku masyarakat pada umumnya lebih berorientasi pada perilaku organisasi dan tidak pada perilaku pribadi atau kepentingan kelompok. Disiplin lalu lintas sangat tinggi di Australia, Jerman, Belanda, Spanyol, sedikit longgar di Perancis.
2. Masyarakat segera bereaksi dengan cara yang wajar (misalnya dengan demo yang tidak anarkis) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam berbagai aspek jika dianggap kebijakan-kebijakan itu tidak memihak kepentingan masyarakat (upah, perlindungan terhadap anak, kesejahteraan sosial lainnya). Partisipasi ini segera ditanggapi pemerintahan (karena partisipasi politiknya biasanya berkualitas, tidak asal demo) dan melalui nego-nego yang relistis dan disepakati hal-hal yang secara wajar dapat dicapai.

VIII. E-Government; E-Commerce; E-Learning; dan E-Information: yang telah berjalan baik sehingga hampir seluruh pelayanan publik berjalan cepat, akurat, otomatis dengan sistem yang tertata rapi (tapi ini memang memerlukan rakyat yang sudah "cukup cerdas" karena berhadapan dengan teknologi canggih (walaupun sebenarnya tidak sukar, malah mempermudah segala "urusan"). Peranan komputer, web site, web chat, voice mail, e-mail dan sistem elektronik lainnya, telah dapat mengatur kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi lebih efektif dan efisien.

#### Kesimpulan

Dilihat dari perilaku administrasi dan kebijakan maka di negara maju yang berprinsip *welfare state* maka kecenderungan dan kenyataan yang terlihat ialah: nilai-nilai negara kesejahteraan merefleksi dalam aturan yang memihak kepada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya perilaku organisasi menjadi acuan, sehingga KKN dapat dihindari dan akhirnya perilaku administrasi (manajemen dan dukungan) dapat dijalankan dengan sehat dan baik.